

Malari dan Gerakan Mahasiswa

Oleh: Hendra Kurniawan



MELETUSNYA Gerakan 30 September 1965 telah membuka jalan bagi militer meneguhkan perannya dalam politik dan pemerintahan. Berlandaskan Dwi Fungsi ABRI yang dicetuskan oleh Jenderal Abdul Harris Nasution, militer memegang kendali pemerintahan hingga tiga dekade di bawah Presiden Soeharto. Tak heran pada masa itu muncul istilah persatuan ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Mitra militer di luar partai politik dan elite adalah gerakan mahasiswa bersama kekuatan nonkomunis lainnya dalam masyarakat. Keduanya berperan penting dalam membangun pondasi pemerintahan Orde Baru dengan memperlemah dan mendelegitimasi kekuasaan Soekarno.

Kemesraan militer dengan gerakan mahasiswa mulai memburuk pada awal 1970-an. Puncak ketegangan antara rezim penguasa dengan mahasiswa terjadi saat rusuh politik pertama di era Orde Baru meletus. Malapetaka 15 Januari 1974 yang dikenal dengan istilah Malari bermula dari penolakan terhadap kian masifnya investasi asing, khususnya Jepang, mengalir ke Indonesia. Tanda bahwa bangkitnya kesadaran akan kedaulatan ekonomi tidak muncul akhir-akhir ini saja.

Akibat dari Peristiwa Malari, 11 orang tewas, 42 aktivis mahasiswa dan dosen ditangkap. Beberapa di antaranya ialah Hariman Siregar, Dorajatun Kuntjoro Jakti, Fahmi Idris, Theo L. Sambuaga, Mochtar Lubis, Adnan Buyung Nasution, Bambang Sulistomo, Marsilam Simandjuntak, Soebadio Sastrosastomo, dan Sjahrir. Surat kabar-surat

kabar yang berpengaruh seperti *KAMI, Indonesia Raya, Abadi, Pedoman*, dan *Mahasiswa Indonesia* juga dibredel oleh pemerintah.

Pembreidelan media massa dilakukan untuk membatasi ruang gerak informasi sekaligus mengintensifkan sosialisasi versi pemerintah. Melalui Kopkamtib, pemerintah merekayasa versi resmi dalam Malari yaitu mantan tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan mereka yang gemar mengkritik kebijakan pemerintah. Aspek ekonomi dari Malari, berupa kritik terhadap dominasi modal asing dan ketimpangan sosial ekonomi direduksi oleh pemerintah sebagai konflik politik yang sempit. Pemerintah dengan cepat meredam dan memulihkan situasi.

Peristiwa Malari menyadarkan pemerintah saat itu bahwa ada potensi radikalisme yang dapat menggoyang kekuasaan. Atas dasar itu diperlukan upaya untuk memperkuat kekuasaan dengan mendepolitisasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Pemerintah mengambil langkah-langkah guna mendefungsionalisasikan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

Tahun-tahun selanjutnya setelah Malari, intensitas gerakan mahasiswa menurun. Aksi mahasiswa muncul kembali secara masif pada tahun 1977 dengan mengusung isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintah. Pada Januari 1987, aksi ini

memuncak. Wakil-wakil dari Dewan Mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung dan mengumumkan petisi yang menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan kembali Soeharto sebagai presiden. Saat itulah gagasan suksesi kepemimpinan nasional mulai menghangat.

Para pemimpin mahasiswa ditangkap dan keberadaan Dewan Mahasiswa di setiap perguruan tinggi di Indonesia sejak itu hapus. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoud Joesoef, pemerintah membekukan Dewan Mahasiswa dan meletakkan semua aktivitas mahasiswa di bawah kontrol ketat pemerintah. Semua kegiatan kemahasiswaan harus memperoleh restu dari rektor yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Keputusan ini efektif dalam meredam potensi gerakan mahasiswa yang dianggap membahayakan kekuasaan.

Pemerintah berasumsi bahwa pembinaan kader-kader pemimpin bangsa tidak berarti harus melalui kegiatan politik praktis. Mahasiswa dikembalikan pada fungsi utamanya yaitu belajar dan mempersiapkan masa depan. Mahasiswa masih perlu dibimbing, belum dapat dipercaya, dan hanya mampu menjadi pemimpin untuk rekan-rekannya. Sejak itu kehidupan kampus cenderung

adem ayem, asalkan keselarasan dan keseimbangan kekuasaan tetap terjaga.

Di sisi lain, para pimpinan perguruan tinggi juga ditempatkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang seringkali justru mematikan jiwa akademisi yang sejati.

Dalam perkembangannya, gerakan mahasiswa sebenarnya diam-diam tetap tumbuh walaupun dalam kelompok-kelompok kecil. Idealisme perjuangan mahasiswa kembali meledak tahun 1998 yang berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Reformasi pun bergulir dengan dukungan yang besar dari masyarakat luas. Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap bobrok mulai mengalami perombakan.

Kini setelah hampir dua dekade, gegap gempita reformasi mulai tenggelam. Gerakan mahasiswa juga tak begitu terdengar. Entah karena proses akademisi dewasa ini yang menuntut konsentrasi ekstra atau ada pergeseran pola perilaku mahasiswa menjadi cenderung apatis pada politik. Makna idealisme perjuangan mahasiswa juga mengalami degradasi. Padahal cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai.

Semoga segera tumbuh kembali kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Dengan cara inilah mahasiswa turut andil dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK saat ini untuk mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.